



# LAPORAN KINERJA

## Tahun 2022

### **BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

Komp. Perkantoran Bupati Siak Tanjung Agung  
Kec. Mempura Kab. Siak Prov. Riau  
Email : [siakbkd@gmail.com](mailto:siakbkd@gmail.com)  
Website : [www.bkd.siakkab.go.id](http://www.bkd.siakkab.go.id)

# **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022.


Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Siak ditetapkan dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak telah banyak membuahkan hasil dan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

**Siak Sri Indrapura, Januari 2023**  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN SIAK,**

  
**Drs. L.BUDHI YUWONO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19P690601 199202 1001**

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar Eksekutif Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Keuangan Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Tugas pokok Badan Keuangan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Keuangan Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- e. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, meliputi;

Tabel.1.1

## Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja			Status
			Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	137,511,764,538,00	135,951,372,317.74	98,86%	Sangat Tinggi
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP	WTP	100,00%	Sangat Tinggi

3.	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	BB	100,00%	Sangat Tinggi
4.	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas (Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah)	Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	BB	BB	100,00%	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022</b>					<b>99,71%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI</b> .....	<b>2</b>
a. Kondisi Umum Badan Keuangan Daerah .....	2
b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....	2
c. Kewenangan .....	3
<b>C. Struktur Organisasi</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Sumber Daya Manusia</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Isu Strategis</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Cascading Kinerja</b> .....	<b>10</b>
<b>G. Peta Proses Bisnis</b> .....	<b>12</b>
<b>H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS</b> .....	<b>18</b>
<b>B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022</b> .....	<b>18</b>
<b>C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022</b> .....	<b>28</b>
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>33</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA BKD KABUPATEN SIAK</b> .....	<b>33</b>
<b>I. Sasaran I</b> .....	<b>36</b>
1. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	36
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	45
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah (2016-2022).....	47

4. Analisis Penyebab Kenaikan Kinerja Serta Alternatif	
Solusi yang Telah dilakukan .....	48
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	51
6. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang	
Keberhasilan .....	52
<b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>54</b>
2. Sasaran II .....	55
1. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja	
Tahun 2022 .....	55
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun	
2022 Dengan Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	58
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target	
Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah (2016-2022).....	59
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta	
Alternatif Solusi yang Telah dilakukan .....	60
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	62
6. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang	
Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja .....	63
<b>C. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>68</b>
3. Sasaran III. ....	70
1. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2022. ....	71
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022	
dengan Tahun 2021 dan Berapa Tahun Terakhir.....	73
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target	
Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah (2016-2022) .....	74
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif	
Solusi yang Telah dilakukan.....	75
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	76
6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang	
Keberhasilan Pencapaian Sasaran Ketiga.....	76



<b>D. REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>81</b>
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. KESIMPULAN.....	86
B. RENCANA TINDAK LANJUT.....	88

**LAMPIRAN.**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama .....	iv
Tabel 1.2	Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Berdasarkan Jabatan.....	8
Tabel 1.3	Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Berdasarkan Golongan .....	8
Tabel 1.4	Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan.....	9
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022.....	18
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2022.....	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022.....	28
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Esselon III dan Rincian Anggaran Perprogram Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 .....	29
Tabel 2.5	Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 .....	31
Tabel 2.6	Rincian Anggaran Perprogram Badan Keuangan Daerah Tahun 2022.....	32
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	34
Tabel 3.2	Pengelompokan Capaian Kinerja sasaran Tahun 2022 .....	35
Tabel 3.3	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	36
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	47

Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah BKD 2018-2022 .....	47
Tabel 3.6	Permasalahan dan Solusi.....	48
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Jumlah SDM Tahun 2022.....	51
Tabel 3.8	Realisasi Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Kesatu Tahun 2022 .....	52
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi aAnggaran Target Terhadap Realisasi Capaian Kinerja Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2022 .....	54
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah BKD tahun 2016-2022 .....	55
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Anggaran terhadap Opini BPK RI dengan jumlah SDM Tahun 2020 dengan Tahun 2022 .....	60
Tabel 3.12	Realisasi Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Pada Sasaran Kedua Tahun 2022.....	61
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Anggaran Pencapaian Kinerja "Opini BPK RI" Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Siak Tahun 2020 Dengan Tahun 2022.....	62
Tabel 3.14	Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Sasaran Ketiga tahun 2022.	63
Tabel 3.15	Populasi dan Sampel BKD Kab Siak Tahun 2022.....	69
Tabel 3.16	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator kinerja Sasaran Ketiga BKD Kab. Siak Tahun 2022.....	71
Tabel 3.17	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Ketiga Tahun 2020-2022 .....	71
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Ketiga Tahun 2022 dengan Tahun	

2018 dan beberapa tahun terakhir .....	72
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap target Jangka menengah BKD (2019-2022) .....	73
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Anggaran dan SDM terhadap Capaian Kinerja Sasaran Ketiga Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2022 .....	74
Tabel 3.21 Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Ketiga Tahun 2022.....	75
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Anggaran pencapaian Kinerja Sasaran Ketiga Tahun 2020 dengan Tahun 2022.....	76
Tabel 3.23 Kondisi Target terhadap Realisasi Anggaran BKD Tahun 2019,2020 dan Tahun 2022.....	77
Tabel 3.24 Kondisi Target terhadap Realisasi Anggaran BKD Tahun 2022.....	81
Tabel 3.25 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Kab.Siak Tahun 2021 dan 2022 .....	82

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan daerah Tahun 2022.....	6
Gambar 1.2 Gambar Cascading Kinerja.....	11
Gambar 2.1 Komponen SAKIP .....	16
Gambar 2.2 Dokumen Dalam SAKIP .....	17
Gambar 3.1 Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak.....	38
Gambar 3.2 Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB).....	39
Gambar 3.3 Aplikasi SIMBPHTB (Sistem Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).....	40
Gambar 3.4 Pelayanan PBB & BPHTB di acara BUJANG KAMPUNG .....	41
Gambar 3.5 5 Sosialisasi kepatuhan wajib pajak di desa Kandis .....	41
Gambar 3.6 Perjanjian Kerjasama PT. Bank Riau Kepri dengan Pemerintah Kabupaten Siak .....	42
Gambar 3.7 Sosialisasi SIMBPHTB bersama PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah).....	43
Gambar 3.8 Sosialisasi dalam rangka evaluasi kepatuhan wajib pajak.....	44
Gambar 3.9 Penyuluhan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Luar Jawa .....	45
Gambar 3.10 Penyerahan Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak.....	56

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir .....	46
Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2021 dengan Tahun 2020 Dan Beberapa Tahun Terakhir .....	59



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dalam Hal ini Badan Keuangan Daerah ( BKD) Kabupaten Siak berperan ganda yaitu sebagai SKPD serta PPKD.

## **B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

### **a. Kondisi umum Badan Keuangan Daerah**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Kepala Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
- e. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Kewenangan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai kewenangan :

- a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas badan;
- b. Menetapkan visi dan misi badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. Menetapkan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- d. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/ atau menyampaikan bahan penetapan oleh Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis dinas;
- g. Menetapkan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA badan;
- h. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- j. Melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran yang terdiri dari :
  - 1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) badan;
  - 2) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - 3) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - 4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - 5) Menandatangani SPM;

- 6) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab badan;
  - 7) Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab badan;
  - 8) Mengawasi pelaksanaan anggaran badan; dan
  - 9) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan badan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan kepada PPKD.
- k. Menyampaikan pertimbangan teknis dan atau administratif kepada Bupati terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di daerah;
  - l. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Bupati dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan badan;
  - m. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  - n. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi urusan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan, PBB, dan BPHTB, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah, serta pengawasan dan evaluasi sesuai fungsi SKPD;
  - o. Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan, PBB dan BPHTB, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah;
  - p. Mengarah, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas dilingkungan dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;

- q. Membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/ atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan karier bagi staf / bawahan yang berprestasi dan/ atau berpotensi;
- r. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkat eselonnya atas pelanggaran disiplin staf / bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. Menyampaikan laporan kinerja Badan kepada Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan;
- u. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan;
- v. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

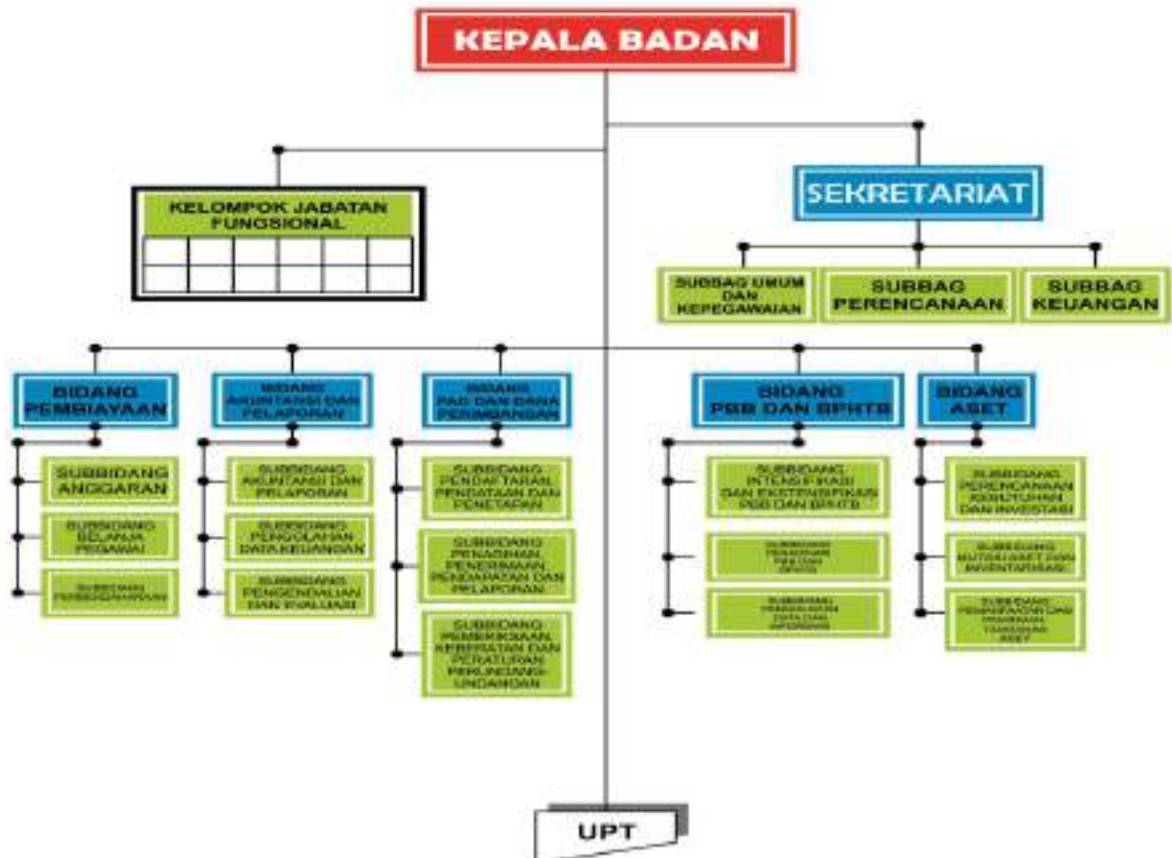
### **C. Struktur Organisasi.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak memiliki formasi sebagai berikut :

GAMBAR. 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Lampiran : Peraturan Bupati Siak  
Nomor : 86 Tahun 2016  
Tanggal : 29 November 2016



- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembiayaan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Anggaran;
  - 2) Sub Bidang Belanja Pegawai; dan



3) Sub Bidang Perbendaharaan.

**d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :**

- 1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan; dan
- 3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

**e. Bidang PAD dan Dana Perimbangan, membawahi :**

- 1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan penetapan;
- 2) Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan; dan
- 3) Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan.

**f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :**

- 1) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
- 2) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB; dan
- 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

**g. Bidang Aset, membawahi :**

- 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi;
- 2) Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi; dan
- 3) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**D. Sumber Daya Manusia**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak terdiri dari Sekretariat dan 5 (lima) Bidang dengan jumlah pegawai sebanyak 109 orang per tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan menurut posisi jabatan Badan Keuangan Kabupaten Siak memiliki 1 orang pejabat eselon II, 6 orang pejabat eselon III, 28 orang pejabat eselon IV, 74 orang fungsional umum.

**TABEL. 1.2**  
**Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022**  
**Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan Eselon II.b	1	-	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang/ Eselon III.a/ III.b	5	1	6
3.	Kepala Subbag/Subbid/Fungsional/Eselon IV.a	13	5	18
4.	Kepala UPT / Eselon IV.a	4	1	5
5.	Kepala Tata Usaha UPT / Eselon IV.b	2	3	5
6.	Fungsional Umum	43	31	74
7.	PTT	70	45	115
<b>J U M L A H</b>		<b>138</b>	<b>86</b>	<b>224</b>

**TABEL. 1.3**  
**Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

Jenis Kelamin	Golongan			Jumlah
	IV	III	II	
Laki – laki	8	43	15	66
Perempuan	3	35	5	43
Jumlah	11	78	20	109
Persen thd total (%)	10.09	71.56	18.35	100.00

Pertanggal 31 Desember 2022, kualitas sumber daya manusia Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak relatif baik, tercermin dari tingkat pendidikan. Jumlah pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebanyak 109 orang, 12 orang berpendidikan master (S2), 62 orang berpendidikan sarjana (S1), 11 orang berpendidikan Diploma III (D3), 1 orang berpendidikan Diploma 2 (D2), 27 orang berpendidikan SMA. Tabel 1.1 menunjukkan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan.

**TABEL. 1.4**  
**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Uraian							Jumlah
	S2	S1	DIV	D3	D2/D1	SLTA	
Laki – laki	8	30	-	7	-	21	66
Perempuan	3	24	2	7	1	6	43
Jumlah	11	54	2	14	1	27	109
Persen thd total (%)	10.09	49.54	1.83	12.84	0.92	24.77	100.00

### E. Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan ketugasan dan fungsi Badan Keuangan Daerah selaku pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagaimana disebutkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 terdapat isu-isu strategis terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada Badan Kuangan Daerah Kabupaten Siak diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan belum Optimal
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum Optimal
3. Pengelolaan Pendapatan belum Optimal

Kemudian dapat kami tambahkan penjelasan sebagai berikut :

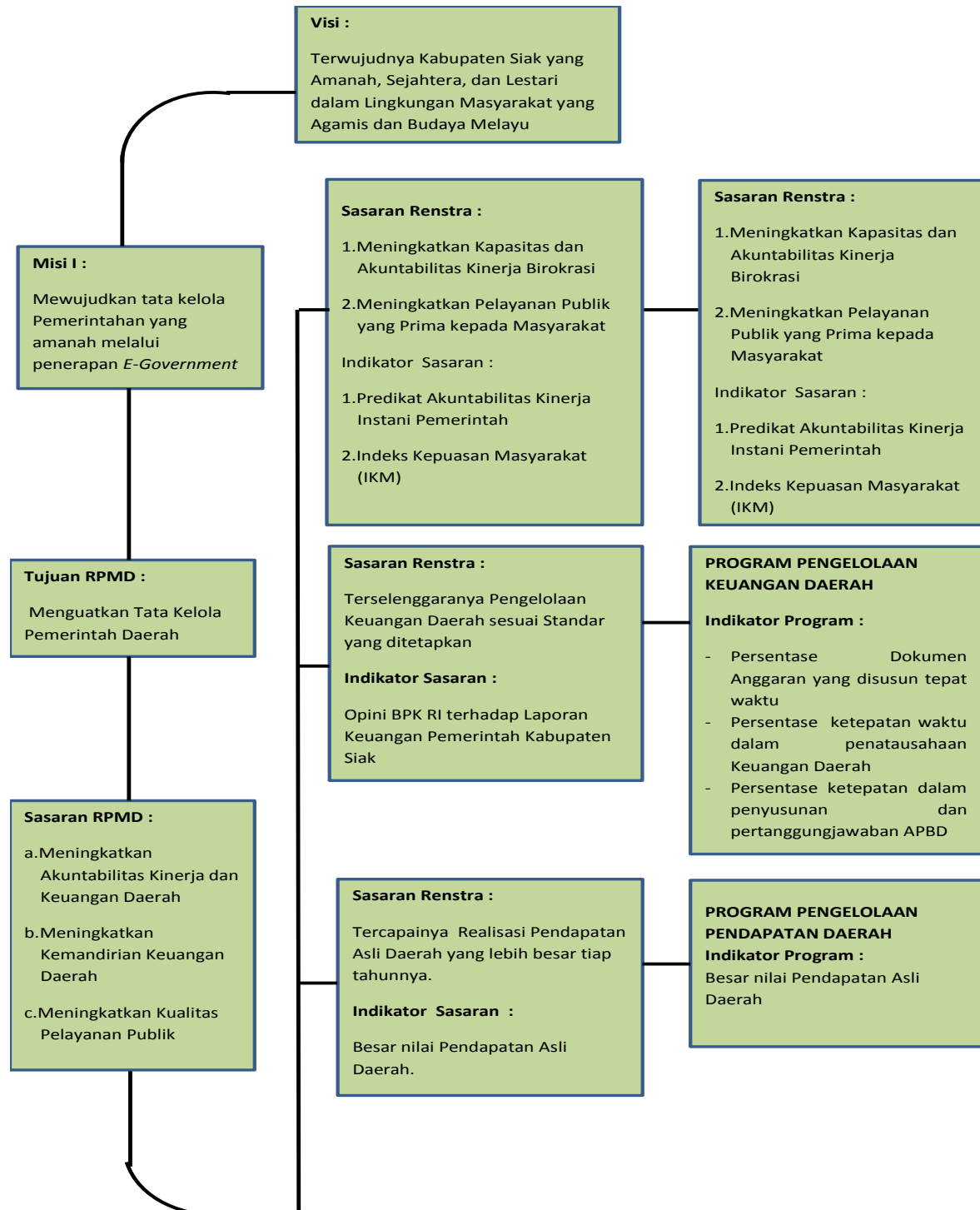
1. Format Opini WTP atas LKPD Kabupaten Siak n-1 tidak terdapat lagi catatan atau keterangan atas opini tersebut, hanya terdapat keterangan atas temuan saja;

2. Belum memadai implementasi SAP berbasis akrual;
3. Masih kurangnya kesadaran warga masyarakat atau Wajib Pajak atas kewajiban Pajak Daerah, sehingga masih perlunya dorongan berupa himbauan, ajakan, reward serta pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
4. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah;
5. Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan;
6. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas;
7. Masih memerlukan Aplikasi pendamping dalam pengelolaan keuangan selain SIPD dari Pusat;
8. Belum adanya integrasi dari SIPD ke Aplikasi pendamping pengelolaan keuangan sehingga masih dilakukan double entri, yang memungkinkan adanya kesalahan; dan
9. Pengendalian atas penatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal;

#### **F.Cascading Kinerja**

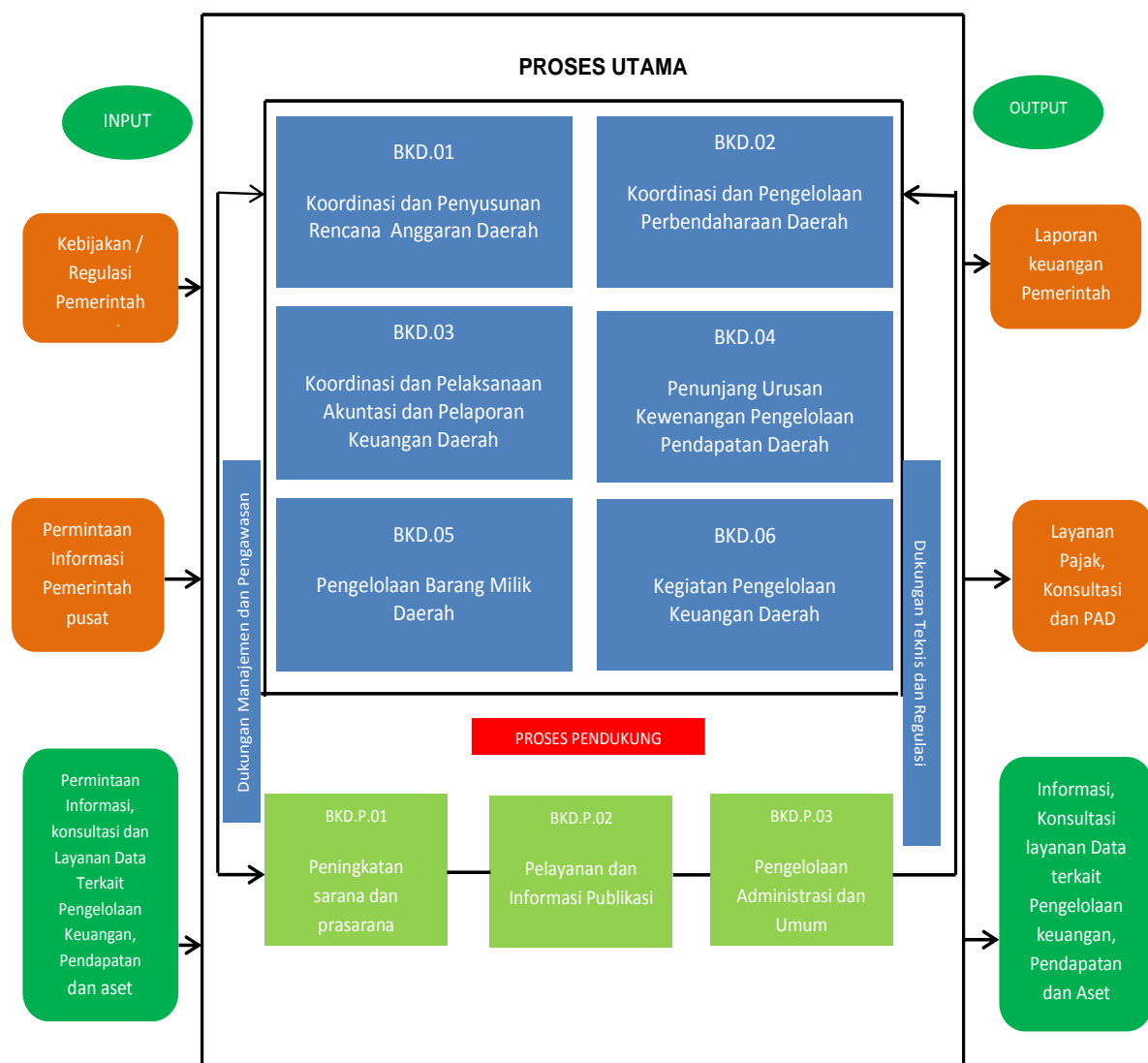
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Siak, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 05 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.2 Gambar Cascading Kinerja



## G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Badan Keuangan Daerah :





## H. Tindak Lanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dalam Surat Inspektorat Kabupaten Siak Nomor 069.1/IK-SEKR/452.6 tanggal 15 Juni 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Siak Tahun 2021 atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Keuangan Kabupaten Siak, disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dimanfaatkan untuk penilaian kerja dan <i>direviu secara berkala</i> .	Dilakukan rapat koordinasi ataupun share data capaian kinerja agar mendapatkan gambaran kepada pelaksana teknis atas capaian kinerja
2.	Target kinerja Eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya.	Dalam Target Kinerja tahun berikutnya akan dimonitor mengenai pencapaian masa depan
3.	Agar melaksanakan pengukuran (Capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i> .	Dalam Capaian Kinerja pada tahun berikutnya akan melakukan Evaluasi langkah-langkah nyata kedepan dengan pemberian <i>reward &amp; punishment</i> .
4.	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.	Dalam Pengukuran Kinerja tahun berikutnya akan dilakukan pemantauan secara berkala
5.	Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, untuk peningkatan kinerja dan untuk penilaian kinerja.	Informasi yang disajikan untuk peningkatan kinerja dan untuk penilaian kinerja pada tahun berikutnya.
6.	Melaksanakan penyempurnaan Evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program, perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.	Dalam Evaluasi Program pada tahun berikutnya akan ditambahkan penjelasan atas solusi yang telah dilakukan

<b>7.</b>	Pemantauan rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja.	Dalam Rencana Aksi pada tahun berikutnya akan ditambahkan mengenai langkah masa depan
<b>8.</b>	Pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan Hasil Evaluasi Rencana Aksi diterapkan dalam bentuk langkah-langkah nyata.	Dalam Rencana Aksi tahun berikutnya akan melakukan Evaluasi dengan langkah-langkah nyata kedepan
<b>9.</b>	Melaksanakan penyempurnaan Hasil Evaluasi Rencana Aksi untuk menunjukkan perbaikan setiap periode.	Dalam Hasil Evaluasi Rencana Aksi tahun berikutnya akan dilaksanakan penyempurnaan dan dilakukan setiap Triwulan
<b>10.</b>	Hasil evaluasi program digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.	Dalam Evaluasi Program tahun berikutnya akan dilakukan Evaluasi langkah-langkah nyata kedepan
<b>11.</b>	Meningkatkan pencapaian sasaran (kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> ) yang dilaporkan.	Dilaksanakan peningkatan pencapaian sasaran ( <i>kinerja output dan outcomes</i> ) dimasa yang akan datang

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

**Gambar 2.1**

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak



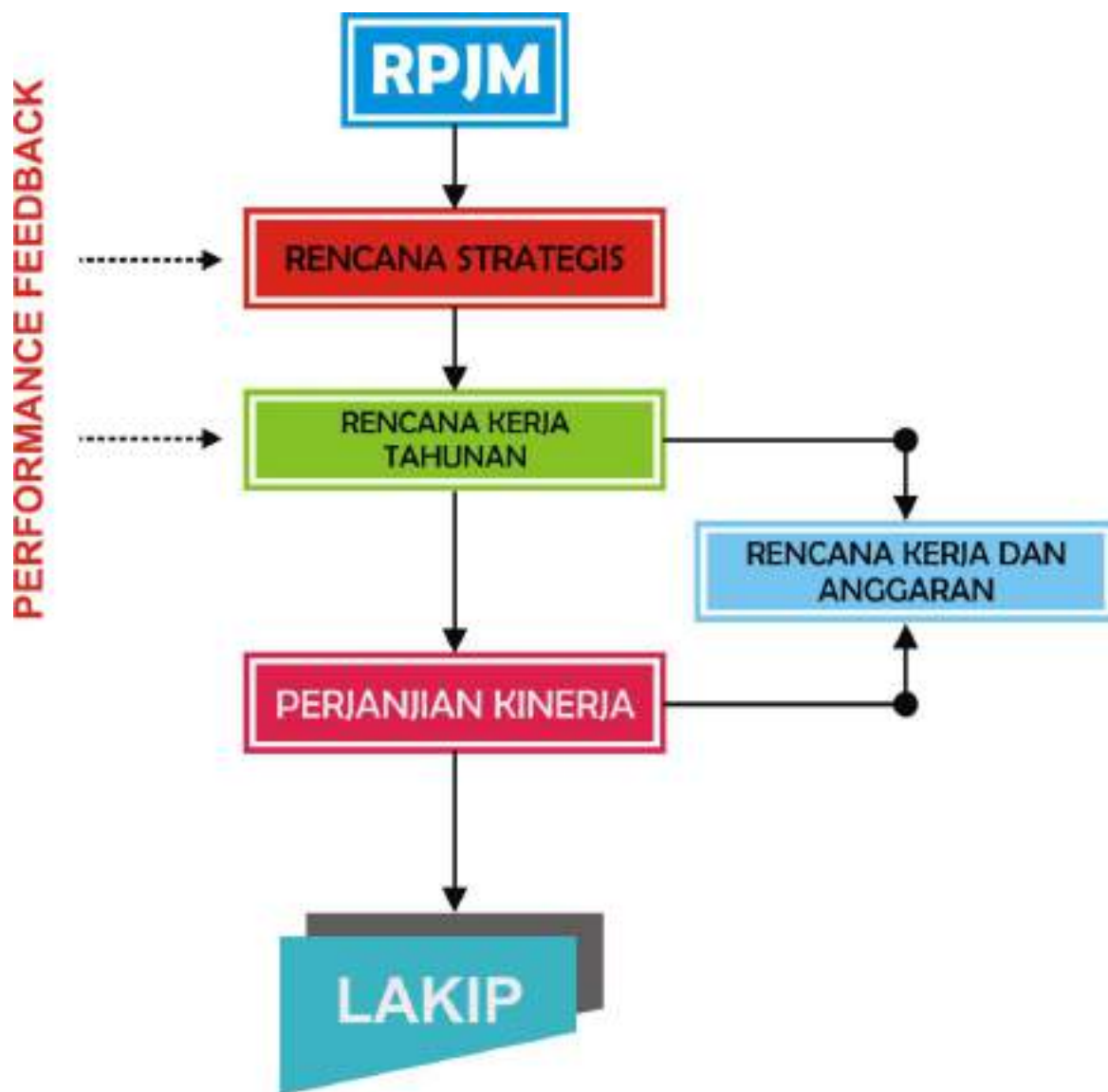
Sumber : Perpres 29/2014



Sumber : Permen PAN-RB 12/2015

Berikut adalah dokumen-dokumen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dalam gambar 2.2

Gambar 2.2  
Dokumen dalam SAKIP



## A. RENCANA STRATEGIS.

Rencana Strategis merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di raih selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistimatis dan terukur dengan memperhatikan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang mungkin terjadi serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Didalam dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat secara lengkap pada tabel II.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**

### INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp. (M)	257.980	170.457	220.520	233.167	247.332	252.777	252.777
2.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 merupakan perencanaan kinerja yang menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program/kegiatan dengan pagu indikatif yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan mekanisme



perencanaan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 diproses menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pelapori Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang selanjutnya diproses melalui mekanisme pembahasan untuk disahkan menjadi APBD yang dirincikan dalam bentuk Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 yang mengacu pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2022, dapat dilihat secara lengkap sebagaimana terlampir.

Berdasarkan data Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut diatas, terdapat 3 (tiga) sasaran beserta 4 (empat) indikator kinerja yang akan diukur capaian kinerjanya.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja sebagaimana tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka Badan Keuangan Daerah melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal perencanaan dan penganggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Untuk mengetahui perbandingan anggaran sebelum dan sesudah perubahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022**

Sasaran			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
Uraian	Indikator Kinerja	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8
Tercapainya Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Lebih Besar tiap Tahunnya	Besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah	137,511,764,538,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan yang Taat Azas, Tepat Waktu dan Akuntabel	%	100	2,173,648,950.00.00
			Pengelolaan Pendapatan Daerah				2,173,648,950.00
			Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis	4	422,700,000.00
			Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah SPPT PBB-P2 Kab. Siak yang Diverifikasi	Kecamatan	2	43,151,300.00
			Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Data PBB P2 Kab. Siak yang Dikelola	SPPT	170.000	265,435,450.00
			Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah WP dan Retribusi Daerah yang didata dan ditetapkan	WP	1.226	59,010,400.00
			Penagihan pajak daerah	Jumlah WP yang Ditagih Pajak Daerah Kepatuhan Kewajiban Pajak Daerah	WP	1.226	55,500,800.00

			Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah WP yang Diperiksa Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Daerah	WP	100	700,445,000.00
			Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah PBB P2 Kab. Siak yang Disampaikan dan ditagih	Kecamatan	14	627,406,000.00
		<b>WTP</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Taat Azaz, Tepat Waktu dan Akuntabel</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>268,472,928,900.00</b>
			<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>				<b>251,284,200.00</b>
<b>Terselenggara Pelayanannya dibidang Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar yang ditetapkan</b>	<b>Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak</b>		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA/PPAS Kab. Siak tahun yang akan datang	Dokumen	2	24,960,000.00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	24,960,000.00
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	90,469,600.00
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	110,894,600.00

<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>				<b>389,227,700.00</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja, SP2D, Register SP2D Menurut Belanja, SPP, SPM dan Tersedianya Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Transfer	Dokumen	6	115,087,400.00
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pengelolaan Keuangan yang berlaku	Dokumen	1	90,030,300.00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang	100	184,110,000.00
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>				<b>132,110,700.00</b>

		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Realisasi Penyelesaian Piutang Daerah	Laporan	1	8,565,300.00
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Laporan	1	25,264,400.00
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Siak dan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	98,281,000.00
		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>267,666,461,800.00</b>
		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Laporan Hasil Investasi Pemerintah Daerah	Buku	8	180,200,000.00
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tahun	1	234,889,961,800.00

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana darurat dan mendesak	Tahun	1	25,000,000,000.00
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten	Tahun	1	7,596,300,000.00
<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>				<b>33,844,500.00</b>
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dan Jenis Perawatan Jasa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jenis	6	33,844,500.00
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>876,865,800.00</b>
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				<b>876,865,800.00</b>
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Plang dan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Siak	Sertifikat	116	671,322,800.00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Barang Milik Daerah yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa, KSP, BGS, atau BSG dan			98.038.000.00

			Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	KSPI			
				Persentase Barang Milik Daerah yang dihapuskan dan dijual dengan penjualan/lelang atau dimusnahkan (Rp. 153.162.108.518,10)			
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Tahunan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	107,505,000.00
<b>Terselenggara ranya Pelayanan yang Berkualitas</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>5</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>33,750,429,853.00</b>
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>23,558,036,808.00</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Orang	106	23,558,036,808.00
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>3,044,880,120.00</b>	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jenis	5	16,083,600.00	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	2	162,472,500.00	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Makan Minum yang Tersedia	Jenis	67	676,418,720.00
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	20	112,828,800.00
	<b>Nilai Predikat Sakip</b>	<b>BB</b>					

		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	5	21,997,500.00
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Peninjauan Lapangan ke Kecamatan Dalam Kabupaten	Kali	800	2,055,079,000.00
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>387,819,400.00</b>
		Pengadaan mebel	Jumlah dan Jenis Mebeleur kantor yang diadakan	Jenis	1	58,749,900.00
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dan Jenis Komputer, Printer dan Kelengkapannya yang diadakan	Jenis	2	126,200,000.00
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis	1	202,869,500.00
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>5,836,520,500.00</b>
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis dan perangko materai dan perangko surat	Jenis	2	6,803,400.00
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	5	748,582,500.00
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan Tenaga Administrasi gedung kantor	Orang	147	5,081,134,600.00
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>923,173,025.00</b>
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Jumlah Jasa dan Jenis Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	26	625,240,000.00



		atau kendaraan dinas jabatan			
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis	34,650,000.00
		Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Jenis	33,351,000.00
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin	Gedung Kantor	190,795,701.00
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara secara rutin/berkala	Jenis	39,136,324.00
<b>JUMLAH</b>					<b>305,273,873,503.00</b>

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja dilakukan setelah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditanda tangani oleh tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku. Perjanjian Kinerja dirumus berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang merupakan dasar dan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga tugas dan wewenang yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan SKPD dapat dinilai dan dievaluasi capaian kerjanya. Untuk mengetahui secara lengkap tentang Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya	Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah	137,511,764,538,00
2.	Terselenggaranya pelayanan dibidang pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	WTP
3.	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Predikat Sakip BKD	BB BB

Berdasarkan data Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut diatas, terdapat 3 (tiga) sasaran beserta 4 (empat) indikator kinerja yang akan diukur capaian kerjanya.

Tabel 2.4

**Perjanjian Kinerja Eselon III dan Rincian Anggaran Per Program di Badan Keuangan Daerah  
Tahun Anggaran 2022**

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN (RP)	PENANG GUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
1	2	3	4	5	7	8
Tercapainya Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Lebih Besar tiap Tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	137,511,764,538,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah	2.362.007.350	Bidang PAD dan Dana Perimbangan
Terselenggaranya Pelayanan dibidang Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar yang ditetapkan	Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dalam penyusunan RanPerda Pertanggung jawab APBD	238.084.200	Bidang Akuntansi
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	299.197.400	Bidang pembiayaan

			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah	1.100.341.300	Bidang Aset
Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.333.300.000	Bidang Sekretariat
	b. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi	BB				
					<b>28.332.930.250</b>	

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja sebagaimana tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka Badan Keuangan Daerah melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal perencanaan dan penganggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Untuk mengetahui perbandingan anggaran sebelum dan sesudah perubahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 2.5**  
**ANGGARAN BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022**  
**(SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN)**

KODE REK	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	(Rp)	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>305.273.873.503</b>	<b>297.518.698.287</b>	<b>(7.755.175.216)</b>	<b>(0,97)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>37.286.181.803</b>	<b>39.660.415.087</b>	<b>2.374233284</b>	<b>1,06</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	24.070.016.808	24.878.611.600	808.594.792	1,03
<b>5.1.2</b>	Belanja barang dan jasa	13.216.164.995	14.781.803.487	1.565.638.492	11,1
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>726.069.900</b>	<b>1.772.161.400</b>	<b>1.046.091.500</b>	<b>24,4</b>
5.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	534.069.900	1.444.161.400	1.3910.091.500	27,4
5.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	192.000.000	328.000.000	136.000.000	1,7

Berdasarkan penyajian tabel perubahan anggaran diatas dapat diketahui bahwa anggaran belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 305.273.873.503,- sedangkan pada APBD Perubahan anggaran belanja Daerah menjadi sebesar Rp. 297.518.698.287,- berkurang sebesar (7.755.175.216) atau (0.97) % perubahan terjadi pada belanja daerah yang terdapat pada program sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 2.6**  
**RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022**  
**(SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN)**

<i>NO</i>	<i>NAMA PROGRAM</i>	<i>SEBELUM PERUBAHAN (Rp)</i>	<i>SETELAH PERUBAHAN (Rp)</i>	<i>(BERKURANG) /BERTAMBAH (Rp)</i>	<i>%</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	36.776.704.537,-	36.776.704.537,-	0	100
2.	Program pengelolaan keuangan daerah	257.279.645.100,-	257.208.070.000,-	(71.575.100,-)	(99,97)
3.	Program pengelolaan barang milik daerah	1.100.341.300,-	1.100.341.300,-	0	100
4.	Program pengelolaan pendapatan daerah	2.362.007.350,-	2.362.007.350,-	0	100
<b>Jumlah</b>		<b>297,518,698,287,-</b>	<b>297,447,123,187,-</b>	<b>(71.575.100,-)</b>	<b>(99,98)</b>

Seiring dengan terjadinya perubahan anggaran, maka terdapat pula perubahan pada target pada Indikator Sasaran kesatu yaitu "**Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah**". Untuk mengetahui perubahan target pada Indikator Kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai berikut :

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang akan diukur capaian kinerjanya terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang mengalami perubahan target yaitu Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 130,761,505,649,- dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.137.551.764.538,-. Data perubahan target tersebut sesuai dengan perubahan target yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Keuangan Daerah tahun anggaran 2022

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA BKD KABUPATEN SIAK**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Kinerja Badan Keuangan Daerah Mencakup 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ingin diraih dalam rangka pencapaian Visi dan Misinya. Pencapaian dari 3 Sasaran Strategis dimaksud diukur melalui 4 indikator kinerja. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

**TABEL 3.1**  
**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	91% ≥	Sangat Tinggi	
2.	76 % ≥ 90 %	Tinggi	
3.	66 % ≥ 75 %	Sedang	
4.	51 % ≥ 65 %	Rendah	
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	

*Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian.*

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel III.2 dibawah ini :



**TABEL 3.2**  
**PENGELOMPOKAN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja			Status
			Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	137,511,764,538,00	135,951,372,317.74	98,86%	
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP	WTP	100,00%	
3.	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	BB	100,00%	
4.	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas (Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah)	Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	BB	BB	100,00%	
<b>Rata-rata Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022</b>					<b>99,71%</b>	

Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja, dapat diketahui realisasi terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Nilai Realisasi Kinerja “Sangat Tinggi” (91 %  $\geq$ ) sebanyak 3 Indikator Kinerja yaitu :
  - a. *Tercapainya realisasi pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya*
  - b. *Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan dengan indikator kinerja Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak*
  - c. *Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah.*
  - d. *Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan Daerah.*

Capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2022 pada sasaran strategis dapat diuraikan melalui analisis capaian Kinerja sebagai berikut :



Capaian kinerja terhadap Sasaran Kesatu dengan Indikator Kinerja “Besarnya Nilai Pendapatan Asli Daerah” yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar Rp. 137,511,764,538,00 akan diuraikan realisasi capaian kinerjanya melalui hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

### 1. PERBANDINGAN TARGET TERHADAP REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Hasil dari pengukuran kinerja pada sasaran kesatu dengan indikator kinerja (Besarnya Nilai Pendapatan Asli Daerah) sebagaimana terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel perbandingan target terhadap realisasi sebagai berikut :

**TABEL 3.3**

#### PERBANDINGAN TARGET TERHADAP REALISASI BESAR NILAI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			REALISASI s/d TAHUN 2021	TARGET AKHIR (2022) RENSTRA
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya.	Besarnya Nilai Pendapatan Asli Daerah.	Rupiah	137,511,764,538,00	135,951,372,317.74	98,86%	179,218,119,391,96	135,951,372,317.74

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022

Jika dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran 2022, maka dapat dikategorikan pada kategori capaian (*Sangat Baik*). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan pada analisis penyebab kenaikan kinerja terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 :

**A. Kemampuan mengenali potensi dari produk-produk yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah.**

Pengenalan potensi utamanya yang bersumber dari potensi pajak dilakukan melalui kegiatan pendataan, pemantauan dan pendaftaran wajib pajak, beberapa wajib pajak baru berhasil dilakukan pendataan untuk selanjutnya didaftar menjadi wajib pajak daerah. Jumlah wajib pajak PBB tahun 2022 sebanyak 68.716 wajib pajak, pada tahun 2021 sebanyak 71.533 wajib pajak mengalami penurunan sebanyak 2817 wajib pajak atau menurun 0,96%. Sedangkan Jumlah wajib pajak selain PBB pada tahun 2022 sebanyak 1.437 sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1.165 wajib pajak. Dengan demikian mengalami peningkatan dengan adanya jumlah wajib pajak baru sebanyak 272 WP atau naik 1,23%. Disamping itu, upaya menggali dan mengenali potensi dilakukan pula secara mendalam (intensive) terhadap perilaku wajib pajak dengan tujuan mengetahui potensi riil dari wajib pajak. Secara akademis dilakukan kajian potensi pajak untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak di Kabupaten Siak. Hasil kajian tersebut digunakan pula sebagai bahan pembandingan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dan penentuan target pada tahun-tahun berikutnya. Terhadap perilaku wajib pajak sampai dengan saat ini masih harus dilakukan pembinaan baik itu yang sifatnya menyeluruh seperti sosialisasi maupun pembinaan khusus terhadap wajib pajak tertentu dengan cara dilakukan bedah wajib pajak dan atau pemeriksaan wajib pajak. Upaya bedah wajib pajak dan pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka membina wajib pajak untuk melakukan pengadministrasian terhadap omset wajib pajak dengan benar menurut kaidah akuntansi umumnya.

**B. Publikasi melalui media cetak, media elektronik dan tatap muka.**

Media cetak dan media elektronik memiliki peranan penting dalam mengenalkan produk-produk kepada masyarakat pengguna jasa dan meningkatkan volume pemakaian sumber pajak dan retribusi. Pemerintah Kabupaten Siak melalui BKD khususnya berusaha meningkatkan jumlah wajib pajak aktif sehingga terus berupaya agar para pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini BKD melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat Siak. Selain perlunya meningkatkan

kesadaran masyarakat, pemerintah Kabupaten Siak melalui BKD juga merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2022, sosialisasi ditempuh melalui beberapa upaya diantaranya : media elektronik yaitu radio sebanyak 2 (dua) kali, Spanduk / Baleho dan beberapa kali tatap muka dengan para wajib pajak. Disamping itu sosialisasi juga dilakukan melalui website yang dikelola Pemerintah Kabupaten Siak.



Gambar 3.1 Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak



### C. Perbaikan pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam upaya perbaikan pelayanan dan peningkatan validitas pengenaan pajak, BKD memaksimalkan sumber daya diantaranya adalah teknologi. Teknologi memungkinkan pelayanan yang tepat, mudah dan hasil yang lebih valid. Pada saat ini BKD memiliki memiliki 3 (tiga) Sistem Informasi terkait penerimaan pajak yang dikelola BKD yaitu :

#### a. Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB)

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran. Sistem ini mengakomodir kebutuhan pekerjaan kantor (administratif) sejak pembentukan / pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), pemrosesan, pemeliharaan basis data, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT dan DHKP.



Gambar 3.2 Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB)

#### b. SIMBPHTB (Sistem Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Sistem aplikasi ini dibuat pada Tahun 2021 dengan menggunakan dana APBD perubahan dan beroperasi pada Tahun 2022. Aplikasi tersebut berfungsi untuk melakukan manajemen atas pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan



Bangunan (BPHTB). Digunakan untuk mempermudah perhitungan dan mempermudah wajib pajak dalam pengurusan pembayaran BPHTB yang telah terkoneksi dengan seluruh PPAT Kabupaten Siak dan BPN Kabupaten Siak.



Gambar 3.3 Aplikasi SIMBPHTB (Sistem Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

#### D. Pemasangan tapping device untuk beberapa wajib pajak yang dipilih

Tapping device merupakan alat yang digunakan untuk memantau atau memonitor transaksi dari suatu tempat usaha secara online. Tujuannya untuk mencegah kecurangan, sehingga penerimaan pajak daerah menjadi maksimal. Pemasangan tapping device ini merupakan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mencanangkan kegiatan serupa dalam rangka mensupervisi optimalisasi pendapatan daerah. KPK bekerja sama dengan Bank Riau Kepri setempat terkait pengadaan sewa tapping device tersebut. Sehingga pada tahun 2019 dipasang sebanyak 60 alat tapping device, dengan rincian 60 didanai bank Kasda setempat dalam hal ini adalah Bank Riau Kepri. Jumlah tersebut akan ditambahkan pada tahun-tahun berikutnya. Sosialisasi atas pemasangan alat tapping device ini telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2021. Pemasangan alat ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.



Gambar 3.4 Pelayanan PBB & BPHTB di acara BUJANG KAMPUNG

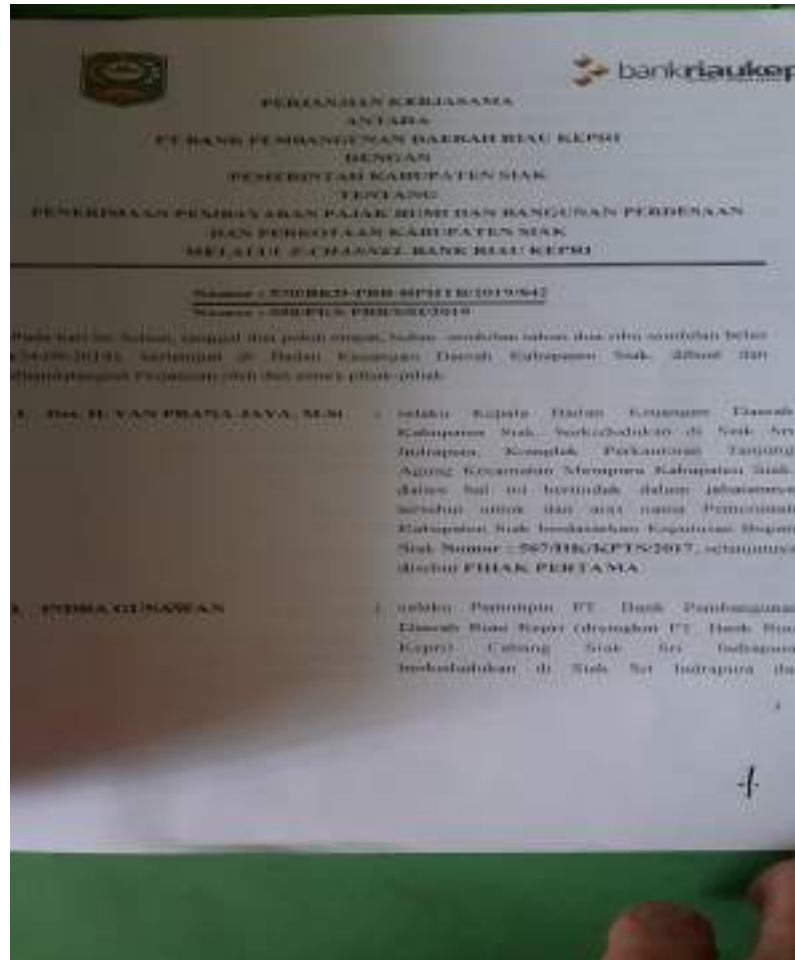


Gambar 3.5 Sosialisasi kepatuhan wajib pajak di desa Kandis

### **E. Kerjasama yang harmonis dengan beberapa pihak.**

Selain mengoptimalkan teknologi informasi di internal BKD, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak PBB P2, BKD melakukan kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran. Terhitung tahun 2019 BKD melakukan inovasi dalam hal peningkatan pelayanan terhadap pembayaran PBB-P2 secara online menggunakan E-Chanel dengan melakukan Perjanjian Kerjasama/MOU Nomor 970/BKD-PBB-BPHTB/2019/842 tanggal 24 September 2021 dengan pihak Bank Riau Kepri dengan menambah tempat pembayaran yang dapat

dilakukan melalui ATM/EDC/M-Banking Bank Riau Kepri dan E-Channel Bank Riau Kepri (Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak, Linkaja, Go-pay dan Traveloka).



Gambar 3.6 Perjanjian Kerjasama PT. Bank Riau Kepri dengan Pemerintah Kabupaten Siak

Kerjasama juga terjalin dengan instansi vertikal yaitu dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan dengan Kantor Pertanahan. Kerjasama dengan kedua instansi tersebut utamanya adalah kerjasama aliansi dalam rangka perbaikan pelayanan dan terkait dengan upaya meningkatkan Bagi Hasil Pph Pasal 21 Pemerintah Kabupaten Siak akan melakukan identifikasi status Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang melakukan usahanya dan memperoleh penghasilan dalam wilayah kabupaten siak, namun belum melaksanakan kewajibannya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebagai Wajib Pajak di Kabupaten Siak, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara



Perpajakan dan PPh Pasal 4 ayat 2 untuk Pajak Pusat. Dengan upaya kerjasama aliansi tersebut diharapkan mendorong penerimaan pajak daerah dan pajak pusat sekaligus. Hal ini diwujudkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak menerima Piagam Penghargaan Terbaik III dari KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan sebagai OPD terbaik dalam mendukung percepatan Penyampaian SPT Tahunan Pegawai ASN / Non ASN Tahun 2022.

Demikian halnya kerjasama dengan PPAT/Notaris yang ada di Kabupaten Siak terkait dengan BPHTB, dibangun SIMBPHTB (Sistem Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) untuk mempermudah perhitungan dan mempermudah wajib pajak dalam pengurusan pembayaran BPHTB yang telah terkoneksi dengan seluruh PPAT Kabupaten Siak dan BPN Kabupaten Siak.



**Gambar 3.7 Sosialisasi SIMBPHTB bersama PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah)**



Kerjasama dengan pemerintah desa tetap terus dilakukan terkait dengan upaya pencapaian pajak PBB. Kerjasama dengan desa terkait dengan pencapaian pajak PBB dimulai dengan penyampaian SPPT PBB, pemantauan penyampaian SPPT, pelaksanaan pekan pembayaran PBB, serta penagihan tunggakan-tunggakan dengan cara jemput bola.



**Gambar 3.8 Sosialisasi dalam rangka evaluasi kepatuhan wajib pajak**



**Gambar 3.9** Penyuluhan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Luar Jawa

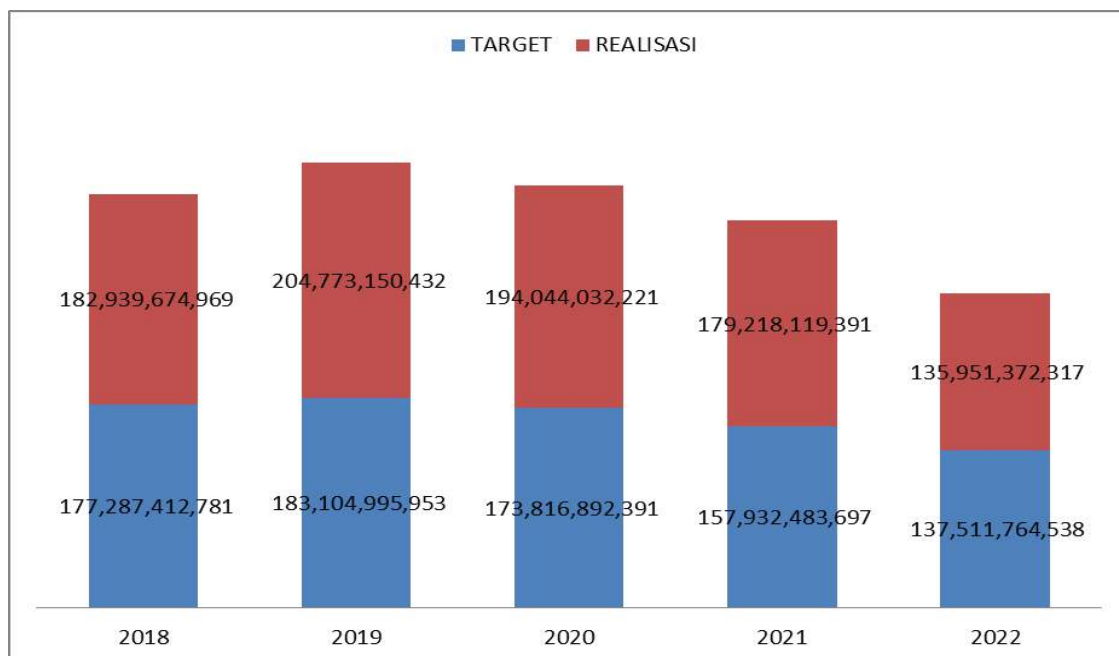
## **2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021 DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

Capaian kinerja Badan Keuangan Daerah pada Sasaran Kesatu dapat dilihat pada Grafik perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir terhadap indikator kinerja Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

Grafik 3.1

**Perbandingan antara target dan realisasi Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir**

Sumber Data : Bidang PAD dan Dana Perimbangan BKD Kab. Siak



Sumber Data : BKD Kab. Siak Tahun 2022

Seiring dengan perbandingan antara target dan realisasi Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir, maka dapat diinformasikan tentang realisasi dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khusus yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.4**  
**PERBANDINGAN REALISASI SUMBER-SUMBER**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2020, 2021 DAN 2022**

NO	URAIAN	REALISASI		2022	
		2020	2021	TARGET	REALISASI
1.	Pajak Daerah	Rp.112.877.923.039,78	Rp. .133.478.683.909,25	Rp. 89.920.000.000,00	Rp. 89.034.210.016,12
2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp .66.886.528.201,00	Rp. 26.139.104.137,00	RP. 33.177,382,461.00	RP. 31.117,933,302.00
3.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp,14.279.580.980,31	Rp. 19.600.331.345,71	Rp. 14,414,382,077.00	Rp. 15,799,228,999.62
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 194.044.032.221</b>	<b>Rp. 179.218.119.391,96</b>	<b>Rp.137,511,764,538.00</b>	<b>Rp. 135,951,372,317.74</b>

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022

### 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH (2016-2022)

Jika dilihat dari potensi pendapatan asli daerah khusus yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada tabel diatas, maka disusun perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun inidengan target jangka menengah sesuai dengan dokumen Perencanaan Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2022 yang terdapat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.5**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET**  
**JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018-2022**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA TAHUN 2022		TARGET JANGKA MENENGAH 2016-2022				
				Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tercapainya realisasi persentase pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya.	Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah.	Rupiah	137,511,764,538.00	135,951,372,317,00	177,287,412,781,00	183,104,995,953,00	173,816,892,391,00	157,932,483,697,00	137,511,764,538.00

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022

Jika dilihat perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran 2021, dengan Rp. 157.932.483.697,00 target jangka menengah Badan Keuangan Daerah, dapat diyakini bahwa capaian kinerja terhadap target jangka menengah Badan



Keuangan Daerah akan tercapai dengan sangat baik, hal ini dikarenakan penetapan target dari beberapa sektor seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sudah memperhitungkan tantangan dan peluang serta solusi yang akan diambil untuk mengatasinya.

#### 4. ANALISIS PENYEBAB KENAIKAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

**Tabel 3.6**

**Permasalahan dan Solusi Sasaran**

Permasalahan	Solusi
Kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakan terutama Pajak Daerah, hal ini memunculkan dampak negatif atas pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Siak	Membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui secara nyata ( <i>real time</i> ) atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dengan memberikan informasi secara terus menerus ( <i>continuous</i> ) baik melalui media informasi, media sosial, serta kegiatan sosialisasi atas pengelolaan Pajak Daerah serta didukung dengan kemudahan atas pelayanan Pajak Daerah

Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam UU tersebut diatur mengenai pengelolaan Pendapatan Daerah	Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan akan dilakukan Revisi Peraturan Daerah tersebut, serta telah disusun draf Rencana Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah
--	--

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan melalui Mobil Keliling Pajak Daerah terutama pada daerah yang jauh dengan tempat pembayaran.
2. Membangun sistem pelaporan secara online bagi pengusaha/investor di Kabupaten Siak dalam sector Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, serta Pajak Daerah yang lainnya
3. Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkala

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Sasaran Kesatu Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 137,511,764,538.00 target ini dapat tercapai dengan baik, hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari beberapa sektor khusus yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 135.951.372.317,00 atau mencapai sebesar 98,86 % dan termasuk kedalam kategori capaian melebihi target (*sangat baik*). Pencapaian kinerja pada target pendapatan berasal dari beberapa sektor Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Penerimaan dari Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 137,511,764,538.00 dapat direalisasikan sebesar Rp.135.951.372.317,00 atau sebesar 98,86 % karena tercapainya target penerimaan pada :

1. Tercapainya penerimaan Pajak Hotel dari target sebesar Rp.750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 688,617,962.00 atau sebesar 91.82 %.
2. Tercapainya penerimaan Pajak Restoran dari target sebesar Rp.4.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,052,252,583.00 atau sebesar 112.27 %.
3. Tercapainya penerimaan Pajak hiburan dari target sebesar Rp. 200,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 26,080,736.00 atau sebesar 21.73 %.
4. Tercapainya penerimaan Reklame dari target sebesar Rp. 1,500,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp 1,847,912,161.02 atau sebesar 123.19 %
5. Tercapainya penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari target sebesar Rp. 35,000,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 41,122,429,219.10 atau sebesar 100,30%.
6. Tercapainya penerimaan Pajak Air Tanah dari target sebesar Rp. 22,500,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 213,528,635.00 atau sebesar 85.41%.
7. Tercapainya penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari target sebesar Rp. 1,000,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 692,343,200.00 atau sebesar 69.23 %
8. Tercapainya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari target sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,602,983,760.00 atau sebesar 106.87 %
9. Tercapainya penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari target sebesar Rp. 6.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,326,402,451.00 atau sebesar 80.70 %
10. Tercapainya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari target sebesar Rp. 32.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 32,461,659,309.00 atau sebesar 99.27 %.



- b. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp. 16.334.597.244,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 31,117,933,302.00 atau sebesar 190.50 %.

## 5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Capaian kinerja pada Sasaran Kesatu dilaksanakan oleh Bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang PBB dan BPHTB dengan Indikator Kinerja "Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah" didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia bidang PAD dan Dana Perimbangan;
2. Sumber daya manusia Bidang PBB dan BPHTB;
3. Sumber daya manusia pada UPTD Kec. Siak, Sungai Apit, Lubuk Dalam, Tualang dan Kandis;
4. Anggaran kegiatan.

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi anggaran dan penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pendapatan daerah tahun 2021 dengan tahun 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.7**  
**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN PENERIMAAN**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN JUMLAH SDM TAHUN 2021**  
**DENGAN TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DAYA			TOTAL ANGGARAN KEGIATAN (REALISASI)	TOTAL REALISASI PAD	TAHUN ANGGARAN
				BIDANG PAD DAN DANA PERIMBANGAN	BIDANG PBB DAN BPHTB	JUMLAH			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya.	Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah.	Rupiah	21 Orang 43 UPTD	25 Orang	89	2,310,909,700,00	1,734,672,560 ,00	2021
				21 Orang 43 UPTD	25 Orang	89	2,362,007,350 ,00	2,133,815,234,00	2022

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran kesatu pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang

PBB dan BPHTB lebih besar dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2021 (Tambah sekitar Rp. 51,916,650.00). Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 (lebih sekitar Rp. 399,142,674.00). Jika dilihat dari persentase capaian kinerja dengan sumber daya manusia yang ada, maka tahun 2022 jauh lebih efisiensi dari tahun 2021.

## 6. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN.

Capaian Kinerja pada Sasaran Kesatu dengan Indikator kinerja "Besarnya Nilai Pendapatan Asli Daerah" dilaksanakan oleh Bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang PBB dan BPHTB melalui Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.8**  
**REALISASI PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG**  
**KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KESATU TAHUN 2022**

Program	Uraian	Belanja		Hasil/Keluaran			Keterangan
		Pagu APBD 2022	Realisasi 2022	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
IProgram Pengelolaan Pendapatan Daerah	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</b>						
	<b>Input</b> Jumlah Dana	<b>372,500,000.00</b>	<b>362,986,438.00</b>				
	<b>Output</b> Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			2	2	unit	
	<b>Outcome</b> Pengelolaan Keuangan Daerah yang Taat Azaz, Tepat Waktu dan Akuntabel			100	97.45	%	
	<b>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</b>						
	<b>Input</b> Jumlah Dana	<b>43,151,300.00</b>	<b>34,755,000.00</b>				
	<b>Output</b> Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak			14	14	laporan	

	Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah						
	Outcome Pengelolaan Keuangan Daerah yang Taat Azaz, Tepat Waktu dan Akuntabel			100	80.54	%	
	<b>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</b>						
	<b>Input</b> Jumlah Dana	<b>265,435,450.00</b>	<b>264,091,096.00</b>				
	Output Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			1	1	Laporan	
	Outcome Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			100	99.49	%	
	<b>Penetapan Wajib Pajak Daerah</b>						
	<b>Input</b> Jumlah Dana	<b>153,498,400.00</b>	<b>145,466,400.00</b>				
	Output Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			1	1	Laporan	
	Outcome Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			100	94.77	%	
	<b>Penagihan Pajak Daerah</b>						
	<b>Input</b> Jumlah Dana	<b>75,493,400.00</b>	<b>72,172,000.00</b>				
	Output Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			8	8	Dokumen	
	Outcome Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			100	95.60	%	
	<b>Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah)</b>						
	<b>Input</b> Jumlah Dana	<b>790,522,800.00</b>	<b>710,473,300.00</b>				
	Output Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			8	8	Dokumen	
	Outcome Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			100	89.87	%	
	<b>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</b>						
	<b>Input</b> Jumlah Dana	<b>661,406,000.00</b>	<b>543,871,000.00</b>				

Output	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			14	14	Dokumen	
Outcome	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			100	82.23	%	
		<b>2,362,007,350</b>	<b>2,133,815,234</b>				

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2023

## B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian Sasaran Kesatu dengan Indikator kinerja "**Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah**" dilaksanakan melalui 1 (satu) program yang terdiri dari 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu bidang PAD dan Dana Perimbangan dan bidang PBB dan BPHTB dengan total anggaran sebesar Rp. 2,362,007,350.00,- dengan realisasi sebesar Rp 2,133,815,234,00,- (90.33%) dan sisa anggaran sebesar Rp 228,192,116,00. Sisa anggaran terjadi karena adanya penghematan terhadap belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, penghematan belanja barang/jasa serta sisa belanja pengadaan barang/jasa. Untuk mengetahui perbandingan realisasi anggaran dalam rangka perolehan Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.9**  
**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA**  
**PENCAPAIAN KINERJA "BESAR NILAI PENDAPATAN ASLI DAERAH"**  
**TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	NILAI PENDAPATAN ASLI DAERAH			TOTAL ANGGARAN KEGIATAN (REALISASI)	TAHUN ANGGARAN
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya.	Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah.	Rupiah	157.932.483.697.00	179.218.119.391.96	113,48%	1.736.694.760,00	2021
			Rupiah	137.511.764.538.00	135.951.372.317.74	98,86%	2,133,815,234,00	2022

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran kesatu pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang

PBB dan BPHTB lebih besar dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2021 ( Rp. 397.120.474,00). Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021 (kurang Rp.43.266.747.074,22), hal ini disebabkan karena pemulihan ekonomi yang masih yang belum membaik pasca pandemik Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya perekonomian masyarakat dan menurunnya daya beli masyarakat.



Capaian Kinerja terhadap Sasaran Kedua dengan indikator Kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak", yang ditargetkan WTP sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022, akan diuraikan realisasi capaian kerjanya melalui hasil dari pengukuran kinerja sebagai berikut :

### 1. PERBANDINGAN TARGET TERHADAP REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022.

Hasil dari pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Sasaran Kedua dengan Indikator Kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak", sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL. 3.10**  
**PERBANDINGAN TARGET TERHADAP REALISASI CAPAIAN KINERJA**  
**OPINI BPK RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			REALISASI s/d TAHUN 2022	TARGET AKHIR (2026) RENSTRA
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	7	8	9	10	11

1	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
---	--	---	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa hasil penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Siak Tahun 2021 telah dihasilkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk tahun periksa tahun 2022 yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penilaian Opini WTP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 menunggu hasil audit Laporan Keuangan dari BPK RI pada Tahun 2023.



**Gambar 3.10** Pemerintah Kabupaten Siak kembali meraih penilaian predikat WTP untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau pada tahun Anggaran 2021.

Jika dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran 2022, maka dapat dikategorikan pada kategori capaian (*Sangat Baik*). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan pada analisis penyebab



kenaikan kinerja terhadap Predikat WTP tersebut merupakan kali yang ke-12 berturut-turut diterima oleh Pemkab Siak yaitu adanya inovasi sebagai berikut :

➤ **Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Secara Online**

Sofit (Software Finansial Terpadu) adalah sistem aplikasi keuangan yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak untuk mengelola keuangan. Awalnya sofit hanya tersedia dalam versi desktop yang mana hanya bisa berjalan pada komputer atau laptop dengan sistem operasi windows. Pada beberapa tahun terakhir Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak melakukan inovasi yaitu membangun Sofit versi WEB.

Dengan dikembangkannya Sofit WEB maka sofit yang sebelumnya hanya bisa diakses menggunakan komputer windows, kini dapat diakses melalui browser web di berbagai perangkat dengan sistem operasi berbeda-beda, seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke internet.

Pada Sofit WEB juga telah dikembangkan fitur baru, yaitu menu Upload Syarat SPP dan menu Upload Syarat SPM. Dengan fitur Upload tersebut, SKPD tidak perlu mengantar berkas fisik lagi.



Sistem Aplikasi Sofit WEB memiliki menu diantaranya sebagai berikut :

a. Upload syarat SPP

Menu ini digunakan oleh Bendahara SKPD untuk mengunggah file hasil scan syarat SPP yang digunakan untuk pengajuan SPM. Setelah

bendahara mengunggah file, kemudian PPK SKPD mengakses menu ini untuk memverifikasinya.

b. Upload syarat SPM

Menu ini digunakan oleh PPK SKPD untuk mengunggah file hasil scan syarat SPM. Syarat SPM digunakan untuk mendaftarkan SPM untuk diproses menjadi SP2D.

c. Pendaftaran SPM

Menu ini digunakan untuk menerima pendaftaran SPM dari SKPD.

d. Pembuatan SP2D

Setelah SPM didaftarkan, Petugas pembuat SP2D menggunakan menu ini untuk membuat konsep SP2D.

e. Pengesahan SP2D

Menu ini digunakan untuk mengesahkan konsep SP2D menjadi SP2D, kemudian mengirim data SP2D ke server Bank Riau Kepri Syariah untuk dicairkan.

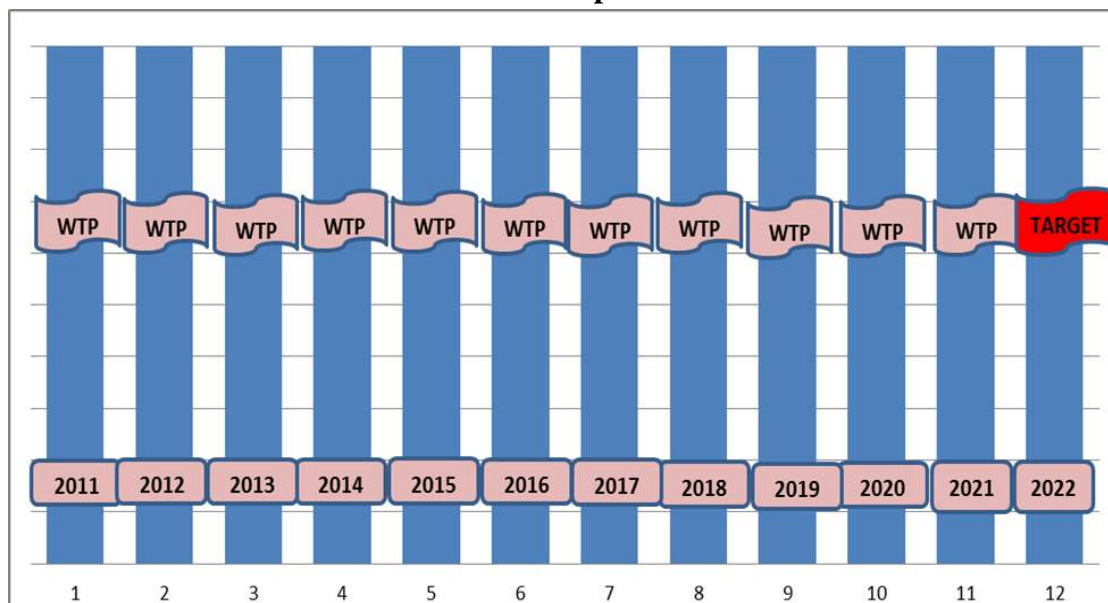
## 2. **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021 DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.**

Untuk mengetahui perbandingan target terhadap realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir terhadap sasaran kedua dengan indikator kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak", dapat dilihat pada Grafik perbandingan dibawah ini sebagai berikut :



Grafik 3.2

**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir.**



Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Thn Anggaran 2022

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun 2021 s/d 2022 terlihat sesuai dengan target sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun bersangkutan. Untuk realisasi capaian kinerja tahun 2022 belum dapat ditentukan karena menunggu hasil audit laporan keuangan dari BPK RI.

### **3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH (2016-2022)**

Jika dilihat dari potensi dan peluang Badan Keuangan Daerah untuk dapat meraih capaian kinerja Opini WTP dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak, maka disusun perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sesuai dengan dokumen

Perencanaan Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2022 yang terdapat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 3.11**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET**  
**JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2022		TARGET JANGKA MENENGAH 2021-2026					
				TAR	REALISASI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022

Berdasarkan dari capaian kinerja tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya diyakini bahwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 akan sesuai dengan target (WTP). Oleh sebab itu Badan Keuangan Daerah membuat perbandingan yang sejajar dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 akan tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan penetapan target tersebut sudah memperhitungkan tantangan dan peluang serta solusi yang akan diambil dalam mengatasinya.

#### **4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja sasaran kedua yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

Tabel. 3.12

**PERMASALAHAN DAN SOLUSI TERHADAP REALISASI CAPAIAN  
KINERJA OPINI BPK RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2022**

Permasalahan	Solusi
(1)	(2)
Pelaksanaan Penatausahaan pada aplikasi SIPD belum optimal	Perlu adanya Integrasi antara aplikasi SIPD dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya (satu data)
Dokumen yang dipersyaratkan dalam proses rekonsiliasi BMD belum dapat terpenuhi secara cepat dan tepat karena koordinasi internal OPD antara Bendahara dengan Pengurus Barang belum terjalin secara optimal	Memaksimalkan pemahaman tugas dan fungsi masing masing komponen dalam OPD sehingga pemenuhan dokumen sebagai persyaratan pelaksanaan pengelolaan BMD dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu
Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam UU tersebut diatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah	Telah ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator pada Sasaran Satu, BKD memiliki langkah strategis yang akan dilakukan untuk kedepannya. Langkah strategis tersebut terdiri dari sebagai berikut;

1. Sosialisasi seluruh OPD dan Unit kerja tentang Pengelolaan BMD;
2. Mengadakan Desk secara Intensif dengan OPD tentang belanja, kode rekening dan aturan-aturan yang terkait penyusunan anggaran;
3. Melakukan rekonsiliasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh OPD;
4. Melakukan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIPD penatausahaan secara menyeluruh, hal ini diharapkan pada tahun 2024 Kabupaten Siak telah menggunakan SIPD secara Full Version.

## 5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pencapaian kinerja pada Saran Kedua dengan Indikator Kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak" didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia bidang Pembiayaan;
2. Sumber daya manusia Bidang Aset;
3. Sumber daya manusia Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
4. Sumber daya manusia pada PPK SKPD se Kabupaten Siak;
5. Anggaran kegiatan.

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi anggaran dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak yang diraih dengan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pelaporan Keuangan Daerah tahun 2021 dengan tahun 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.13**  
**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP OPINI BPK RI DENGAN JUMLAH SDM TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DAYA		TOTAL ANGGARAN KEGIATAN (REALISASI)	REALISASI	TAHUN
				BIDANG /JUMLAH	JUMLAH KESELURUHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini	Pembiayaan/34 Aset /9 Akuntansi dan Pelaporan/10 PPK SKPD/45	98 Orang	135.544.476.257,00	WTP	2021

			Pembiayaan/34 Aset /9 Akuntansi dan Pelaporan/10 PPK SKPD/45	98 Orang	246,286,144,824,00	WTP	2022
--	--	--	--	----------	--------------------	-----	------

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja Sasaran Kedua pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh bidang Pembiayaan, Aset, Akuntansi dan Pelaporan lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2021 (selisih sekitar Rp 110,741,668,567,00). Jika perolehan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2022 sama dengan tahun 2022 (WTP), maka penggunaan sumber daya pada tahun 2022 jauh lebih efisiensi dari pada tahun 2021.

## 6. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI didukung oleh dua Program yaitu Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan Program Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Milik Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 258,308,411,300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 246,286,144,824,00 atau mencapai 95,34% Untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan pada Sasaran Kedua ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.14**  
**REALISASI PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN**  
**CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN KEDUA TAHUN 2022**

Uraian	Belanja		Hasil/Keluaran		
	Pagu APBD 2022	Realisasi 2022	Rencana	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan	238,084,200	168,713,900			

	<b>Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>					
<b>Kegiatan1</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>23,160,000</b>	<b>20,707,500</b>	2	2	Dokumen
Output	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Terlaksananya					
Outcome	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			100	89.41	Persen
<b>Kegiatan2</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>23,160,000</b>	<b>19,092,000</b>			
Output	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2	2	Dokumen
Outcome				100	82.44	Persen
<b>Kegiatan3</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>85,669,600</b>	<b>32,737,500</b>			
Output	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Terlaksananya			2	2	Dokumen
Outcome	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			100	38.21	Persen
<b>Kegiatan4</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>106,094,600</b>	<b>96,176,900</b>			
Output	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2	2	Dokumen

Outcome	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			100	90.65	Persn
<b>Kegiatan5</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>299,197,400</b>	<b>216,401,560</b>			
Output	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Pelaksanaan dan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Hasil Laporan Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pengeluaran Kas Daerah dan Laporan Aliran Kas Pelaksanaan Pemungutan/Pemot dan Penyetoran Perhitungan FihakKetiga (PFK)			1	1	Dokumen
Outcome	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			100	72.33	Persn
<b>Kegiatan6</b>	<b>Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>184,110,000</b>	<b>147,690,500</b>			
Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			45	45	orang
Outcome	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			100	80.22	Persn
<b>Kegiatan7</b>	<b>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>299,197,400</b>	<b>216,401,560</b>			
Output	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			1	1	Laporan
Outcome	Terlaksananya Koordinasi dan			100	72.33	Persn

	Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					
<b>Kegiatan8</b>	<b>Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>16,800,000</b>	<b>15,675,000</b>			
Output	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulana dan Semesteran			1	1	Laporan
Outcome	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100	93.30	Persen
<b>Kegiatan9</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>86,656,000</b>	<b>76,767,500</b>			
Output	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			2	2	Dokumen
Outcome	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100	88.59	Persen
<b>Kegiatan10</b>	<b>Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>72,498,000</b>	<b>52,284,800</b>			
Output	"Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan			1	1	Dokumen



Outcome	Akuntansi Pemerintah Daerah null" Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100	72.12	Persen
<b>Kegiatan11</b>	<b>Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>60,176,800</b>	<b>49,839,800</b>			
Output	Jumlah Dokumen Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1	1	Dokumen
Outcome				100	82.82	Persen
<b>Kegiatan12</b>	<b>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>235,029,461,800</b>	<b>234,974,761,800</b>			
Output	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			1	1	Laporan
Outcome				100	99.98	Persen
<b>Kegiatan13</b>	<b>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>12,378,424,900</b>	<b>909,746,150</b>			
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			1	1	Laporan
Outcome				100	7.35	Persen
<b>Kegiatan14</b>	<b>Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>8,831,300,000</b>	<b>8,831,300,000</b>			
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			1	1	Laporan
Outcome				100	100.00	Persen
	<b>PROGRAM</b>					

	<b>PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>					
<b>Kegiatan15</b>	<b>Pengamanan Barang Milik Daerah</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>636,374,300</b>	<b>567,941,583</b>			
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1	1	Laporan
Outcome	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel			100	89.25	Persen
<b>Kegiatan16</b>	<b>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>162,788,000</b>	<b>126,657,923</b>			
Output	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			15	15	Dokumen
Outcome	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel			100	77.81	Persen
<b>Kegiatan17</b>	<b>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>					
<b>Input</b>	Dana yang tersedia	<b>301,179,000</b>	<b>285,679,000</b>			
Output	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			1	1	Laporan
Outcome	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel			100	94.85	Persen
<b>JUMLAH</b>		<b>258,308,411,300.00</b>	<b>246,286,144,824</b>			

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022

### C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran kedua yaitu **Opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Siak**. Pencapaian sasaran kedua ini dilakukan melalui 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 17 (Tujuh belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pembiayaan, Aset, Akuntansi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp.

258,308,411,300.00 dengan realisasi sebesar Rp. 246,286,144,824 atau mencapai 95,34%

**TABEL 3.15**  
**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN KINERJA**  
**"OPINI BPK RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KAB.**  
**SIK" TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OPINI BPK RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN			TOTAL ANGGARAN KEGIATAN (REALISASI)	TAHUN ANGGARAN
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Rupiah	WTP	WTP	WTP	135.544.476.257,00	2021
			Rupiah	WTP	WTP	WTP	246,286,144,824,00	2022

*Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022*

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran kedua pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2021 (selisih sekitar Rp 110,741,668,567,00), selisih terjadi karena pada tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 17 kegiatan sedangkan pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 17 kegiatan, ditambah lagi dengan selisih total perkegiatan hampir keseluruhannya lebih rendah daripada tahun 2021 karena adanya Refocusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19.



### a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja terhadap sasaran ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 5” terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, Nilai pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Siak. Oleh sebab itu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak harus mampu melayani dan berkerja secara profesional. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala yaitu dengan mengadakan survey kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang dalam masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.

Bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak terhadap pelayanan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Siak dilakukan selain dengan wawancara langsung yaitu dengan menyebarkan kuisisioner kepada penerima layanan yaitu seluruh masyarakat umum yang memanfaatkan layanan Pajak Daerah Kabupaten Siak.

Kemampuan dan kapasitas sumberdaya aparatur di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dicapai melalui pembekalan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara formal dan informal, baik dengan sharing/diskusi di rapat-rapat internal, pengarahan dari pimpinan dan/atau mengirimkan ke/dan/atau melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengelolaan Pajak Daerah.

## 1. PERBANDINGAN TARGET TERHADAP REALISASI KINERJA TAHUN 2022.

Hasil dari pengukuran kinerja pada Sasaran Ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : BB sebagaimana terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.16**  
**PERBANDINGAN TARGET TERHADAP REALISASI KINERJA SASARAN KETIGA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			REALISASI s/d TAHUN 2022	TARGET AKHIR (2026) RENSTR A
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1.	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	BB	BB	100%	BB	BB

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022

Pengukuran Kinerja pada Sasaran Ketiga ini dilakukan melalui questionnaire (kuisisioner terlampir) yang disebarakan kepada 150 dengan menggunakan teknik sensus dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Yang menjadi populasi dan sampel pada pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Ketiga ini adalah masyarakat yang mendapatkan layanan PBB dan BPHTB sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

**TABEL. 3.17**  
**POPULASI DAN SAMPEL BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022**

NO	SUB. POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
1.	PNS/TNI/Polisi	43	43	100
2.	Pemilik Usaha/Wiraswasta/Pedagang/WP	18	18	100
3.	Petani/Pemilik Kebun	61	61	100
4.	Usaha Lainnya	28	28	100

	Jumlah	150	150	100%
--	--------	-----	-----	------

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022

Untuk mengetahui tanggapan responden secara keseluruhan terhadap pengukuran Indikator Kinerja Sasaran ketiga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD dapat dilihat pada rekapitulasi tanggapan Responden pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.18**  
**REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP INDIKATOR**  
**KINERJA SASARAN KETIGA TAHUN 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	TANGGAPAN			JUMLAH RESPONDEN
		Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	
1	2	3	4 = 3*25	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD	4,418	88,36	BB	150

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2023

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Keuangan Daerah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 dilakukan terhadap 14 (empat belas) unsur yang dikaji, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terhadap 150 (seratus lima puluh) responden pada periode 01 September sampai dengan 31 Desember 2022, hasil/nilai/Indeks sebesar 88,36 atau Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 4,42 (skala 5) / BB.

## **b. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah.**

Dalam area perubahan Reformasi Birokrasi salah satunya adalah Penguatan Akuntabilitas. Untuk mengukur pencapaian skor evaluasi AKIP digunakan hasil penilaian capaian kinerja dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut dioperasionalkan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 mendapatkan nilai 78,60 dengan predikat ‘BB’ (sangat baik).

**TABEL 3.19**  
**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK**  
**TAHUN 2022**

NO.	URAIAN	BOBOT	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,27
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,62
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,26
4.	Evaluasi Internal	10	7,07
5.	Capaian Kinerja	20	14,38
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>78,60</b>

Sumber data : Inspektorat Kab. Siak tahun 2022

Badan Keuangan Daerah Kabuapten Siak telah melakukan perbaikan sistem manajemen kinerja dan melakukan berbagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain: a) penyempurnaan kamus indikator untuk setiap kriteria agar ukuran kinerja dapat menggambarkan kinerja yang sesungguhnya; b) penyesuaian IKU dengan perubahan struktur organisasi dan tata laksana, agar dapat menggambarkan *core bussiness* Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dengan jelas.

## **2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021 DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.**

Untuk mengetahui perbandingan target terhadap realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir terhadap rata-rata capaian kinerja Sasaran Ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan



Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah" dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.20**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SASARAN KETIGA TAHUN**  
**2022 DENGAN TAHUN 2021 DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		Tahun 2022			
				2021	2022	Target (2022)	Realisasi (2022)	% CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR (2026) RENSTRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2020

Berdasarkan persentase realisasi capaian kinerja pada Sasaran ketiga Badan Keuangan Daerah dari tahun 2018 s/d 2022 sesuai tabel diatas, perbandingan realisasi kinerja terlihat sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar BB, termasuk kedalam kategori capaian (*sangat baik*).

### 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH (2016-2022)

Perbandingan realisasi capaian kinerja beberapa tahun terakhir dapat menjadi dasar dalam menyusun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016-2022. Untuk mengetahui perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.21**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 TERHADAP TARGET**  
**JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH (2016-2022)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH					TARGET AKHIR (2022) RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah.	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak membuat perbandingan yang sejajar dengan target jangka menengah dengan dengan perubahan yang menggunakan Skala pengukuran (1-5) untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan untuk mengukur Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah sebagaimana terdapat pada dokumen Perencanaan Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2022 akan tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan penetapan target tersebut sudah memperhitungkan tantangan dan peluang serta solusi yang akan diambil untuk mengatasinya.

#### **4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.**

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Sasaran Ketiga yaitu Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berjalannya sistem pengawasan melekat antara pejabat eselon II, III, IV dan Staf;
2. Penerapan peraturan disiplin pegawai dan pengelolaan keuangan semakin baik;
3. Adanya penerapan sanksi terhadap ketidaksiplinan aparatur seperti teguran lisan, tertulis dan pemotongan tambahan penghasilan dan lain-lain.

## 5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Pencapaian kinerja pada Saran Ketiga “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah” didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia Sekretariat Badan Keuangan Daerah;
2. Anggaran kegiatan.

Untuk mengetahui perbandingan antara Sumber Daya Manusia dan realisasi anggaran dengan terhadap capaian kinerja sasaran ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah” tahun 2021 dengan tahun 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.22**  
**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN SDM TERHADAP**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN KETIGA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN**  
**2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	SUMBER DAYA		REALISASI ANGGARAN (Rp.)	TAHUN ANGGARAN
					BIDANG	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD	Nilai	<b>BB</b>	Sekretariat BKD	34 Orang	30,034,294,817,00	<b>2021</b>
		2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	%	<b>78,60</b>			32,991,487,781,00	<b>2022</b>

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja Sasaran Ketiga pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Keuangan Daerah lebih besar dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2021 (selisih sekitar Rp.2.957.192.964 Jika dilihat dari persentase perolehan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah” maka penggunaan sumber daya pada tahun 2022 jauh lebih efisiensi dari pada tahun 2021.

## 6. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ketiga (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah) dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator program cakupan layanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan Indikator dari program Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan dengan total anggaran Rp. 36,773,511,337 dengan realisasi sebesar Rp. 32,991,487,781 atau mencapai 89.72 %. Untuk mengetahui Realisasi Program / Kegiatan pada Sasaran Ketiga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.23**  
**REALISASI PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN**  
**PENCAPAIAN KINERJA SASARAN KETIGA TAHUN 2022**

Program	Uraian	Belanja		Hasil/Keluaran			Keterangan
		Pagu APBD 2022	Realisasi 2022	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>		24,333,300,000	22,554,932,654	106	106	Orang/bulan
	<b>Input</b>	Jumlah Dana					
	<b>Output</b>	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					
	<b>Outcome</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	92.69	%		
	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>		67,512,552	65,123,500	5	5	Paket
	<b>Input</b>	Jumlah Dana					
	<b>Output</b>	Jumlah jPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	<b>Outcome</b>	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	96.46	%		
	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>		213,822,840	212,283,772			
<b>Input</b>	Jumlah Dana						

Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	4	Paket
Outcome	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	99.28	%
<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>781,385,720</b>	<b>711,708,554</b>			
Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			67	67	Paket
Outcome	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	91.08	%
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>138,477,500</b>	<b>138,477,500</b>			
Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			20	20	Paket
Outcome	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100.00	%
<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>22,297,500</b>	<b>10,620,000</b>			
Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan			5	5	Dokumen
Outcome	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	47.63	%
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>2,969,880,000</b>	<b>1,555,817,393</b>			
Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			500	500	Laporan
Outcome	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	52.39	%
<b>Pengadaan Mebel</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>257,671,400</b>	<b>253,488,000</b>			
Output	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan			4	4	Unit
Outcome	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	98.38	%
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>						

<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>775,944,100</b>	<b>731,338,556</b>			
<b>Output</b>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5	5	Paket
<b>Outcome</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	94.25	%
<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>302,697,000</b>	<b>205,246,325</b>			
<b>Output</b>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1	1	Unit
<b>Outcome</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	67.81	%
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>7,603,400</b>	<b>7,603,400</b>			
<b>Output</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2	2	Laporan
<b>Outcome</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100.00	%
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>799,380,000</b>	<b>790,085,025</b>			
<b>Output</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			5	5	Laporan
<b>Outcome</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	98.84	%
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>4,991,132,300</b>	<b>4,786,432,396</b>			
<b>Output</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			7	7	Laporan
<b>Outcome</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	95.90	%
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>724,740,000</b>	<b>588,403,506</b>			
<b>Output</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya			27	27	Unit
<b>Outcome</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	81.19	%

	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>66,550,000</b>	<b>63,515,000</b>				
Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7	7	Unit	
Outcome	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	95.44	%	
	<b>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>49,185,000</b>	<b>45,216,500</b>				
Output	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara			5	5	Unit	
Outcome	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	91.93	%	
	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>220,795,701</b>	<b>220,145,100</b>				
Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			2	2	Unit	
Outcome	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	99.71	%	
	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>						
<b>Input</b>	Jumlah Dana	<b>51,136,324</b>	<b>51,050,600</b>				
Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2	2	Unit	
Outcome	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	99.83	%	
	<b>Jumlah</b>	<b>36,773,511,337</b>	<b>32,991,487,781</b>				

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2020

Jika dilihat dari persentase capaian kinerja program dan kegiatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kegiatan dapat direalisasikan dengan baik, sesuai kebutuhan sisa anggaran terjadi disebabkan karena dilakukannya penghematan anggaran pada belanja barang dan jasa dan belanja perjalanan dinas.



## D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian kinerja sasaran ketiga, pada tahun 2022 telah dilaksanakan 1 (Satu) program yang terdiri dari 18 (Delapan belas) Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 36,773,511,337 dan direalisasikan sebesar Rp. 32,991,487,781. Dari program tersebut diatas total keseluruhan anggaran berjumlah sebesar Rp. **36,773,511,337** dan direalisasikan sebesar Rp. **32,991,487,781** atau mencapai (89.72 %). Untuk mengetahui perbandingan realisasi anggaran tahun 2021 dan tahun 2022 dalam rangka pencapaian kinerja Sasaran Ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.24**  
**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN INDIKATOR**  
**KINERJA SASARAN KETIGA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	TOTAL ANGGARAN KEGIATAN (REALISASI)	TAHUN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD	IKM	BB	BB	BB	30,034,294,817.00	2021
		2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	Predikat	BB	BB	BB	32,991,487,781.00	2022

*Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022*

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran ketiga pada Tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada Tahun 2022 (selisih sekitar Rp. 2,957,192,964) selisih terjadi karena pada Tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 22 kegiatan sedangkan pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 18 kegiatan, ditambah lagi dengan selisih total perkegiatan hampir keseluruhannya lebih besar dari pada tahun 2020.

Sejalan dengan beberapa hal penting yang telah uraikan diatas, dapat diketahui perbandingan total keseluruhan target dan realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah

dari tahun 2021 dan 2022 yang mendukung tercapainya sasaran kesatu, kedua dan ketiga sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.25**  
**PERBANDINGAN TARGET TERHADAP REALISASI ANGGARAN**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK**  
**TAHUN 2021 DAN 2022**

KODE REK	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)		(6)	(7)	(8)
5	BELANJA	35,747,657,521.00	<b>304.226.769.348,00</b>	285.799.263.090,00	<b>93,94</b>
51	BELANJA OPERASI	35,747,657,521.00	<b>37.122.811.065,00</b>	33.256.305.410,00	<b>89,58</b>
	Belanja Operasi	35,747,657,521.00	<b>37.122.811.065,00</b>	33.256.305.410,00	<b>89,58</b>
52	BELANJA MODAL	338,748,300.00	<b>485.238.100,00</b>	358.398.340,00	<b>73,86</b>
	Belanja Modal	338,748,300.00	<b>485.238.100,00</b>	358.398.340,00	<b>73,86</b>
53	BELANJA TAK TERDUGA	46,086,405,821.00	<b>58.800.213.348,00</b>	44.583.338.834,00	<b>75,82</b>
	Belanja Tak Terduga	46,086,405,821.00	<b>58.800.213.348,00</b>	44.583.338.834,00	<b>75,82</b>
54	TRANSFER	12,834,310,000.00	<b>304.226.769.348,00</b>	285.799.263.090,00	<b>98,28</b>
	Belanja Bagi Hasil	12,834,310,000.00	<b>13.267.810.000,00</b>	13.267.794.000,00	<b>100</b>
	Belanja Bantuan Keuangan	242,147,146,800.00	<b>245.426.556.000,00</b>	241.215.924.256,00	<b>98,19</b>
	<b>Jumlah (RP)</b>	<b>301,067,862,621.00</b>	<b>304,226,769,348.00</b>	<b>285,799,263,090.00</b>	<b>93.94</b>

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022

KODE REK	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
5	BELANJA	37,286,181,803.00	<b>24,333,300,000.00</b>	<b>22,559,569,465.00</b>	<b>92.71</b>
51	BELANJA OPERASI	37,286,181,803.00	<b>24,333,300,000.00</b>	<b>22,559,569,465.00</b>	<b>92.71</b>
	Belanja Operasi	37,286,181,803.00	24,333,300,000.00	22,559,569,465.00	<b>92.71</b>
52	BELANJA MODAL	726,069,900.00	726,069,900.00	<b>1,772,161,400.00</b>	<b>92.00</b> 92.00
	Belanja Modal	726,069,900.00	<b>726,069,900.00</b>	1,772,161,400.00	6.98
53	BELANJA TAK TERDUGA	24,950,650,000.00	<b>24,950,650,000.00</b>	12,400,650.00	6.98 99.98
	Belanja Tak Terduga	24,950,650,000.00	24,950,650,000.00	12,400,650.00	99.98
54	Belanja TRANSFER	242,310,971,800.00	242,310,971,800.00	243,685,471,800.00	<b>99.98</b>
	Belanja Bagi Hasil	7,557,000,000.00	242,310,971,800.00	243,685,471,800.00	
	Belanja Bantuan Keuangan	234,753,971,800.00	234,753,971,800.00	234,893,471,800.00	
	<b>Jumlah (RP)</b>	<b>305,273,873,503.00</b>	<b>297,447,123,187.00</b>	<b>281,341,435,885.00</b>	<b>94.59</b>

Sumber data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022

Perbandingan realisasi belanja langsung Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 dan 2022. Sesuai dengan kode belanja, dimana pada tahun 2021 anggaran Badan Keuangan

Daerah untuk belanja langsung sebelum perubahan Rp.301,067,862,621.00,Target sebesar Rp. 304.226.769.348,00 dengan realisasi sebesar Rp. 285.799.263.090,00 (93,94%). Pada Tahun Anggaran 2022 anggaran belanja langsung sebelum perubahan sebesar Rp.305,273,873,503.00,Target sebesar Rp297,447,123,187.00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 281,341,435,885.00 (94.59%).

Jika dilihat dari realisasi terhadap masing-masing anggaran, maka realisasi anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp. 285.799.263.090,00 ,lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 281,341,435,885.00,Kurang (4.457.827.205).Karena tidak adanya kejadian Bencana Alam dan keadaan mendesak sehingga Realisasi pada Sub Kegiatan Pengelola Dana Darurat dan Mendesak sangat kecil serta penghematan belanja dan sisa proses Pengadaan Barang dan Jasa.

## **BAB IV**

# **PENUTUP**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria ***Sangat Tinggi***. Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak pada Tahun 2022 antara lain adalah :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala setiap bulannya dalam menunjang pelaporan keuangan serta barang milik daerah;
2. Meningkatkan pelayanan atas pajak daerah berupa informasi dan sistem pembayaran online.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Perlu adanya Integrasi antara aplikasi SIPD dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya (satu data);
2. Memaksimalkan pemahaman tugas dan fungsi masing - masing komponen dalam OPD sehingga pemenuhan dokumen sebagai persyaratan pelaksanaan pengelolaan BMD dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu;
3. Membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui secara nyata (*real time*) atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dengan memberikan

- informasi secara terus menerus (*continuous*) baik melalui media informasi, media sosial, serta kegiatan sosialisasi atas pengelolaan Pajak Daerah serta didukung dengan kemudahan atas pelayanan Pajak Daerah;
4. Telah ditetapkan Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan akan dilaksanakannya perubahan pada tahun 2023, maka perlunya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.